



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)  
**UNIT KERJA** : BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ARIEF FADHILLAH**
2. Jabatan : **KEPALA PERWAKILAN**
3. NHK : **85433**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.815.854.971

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/81 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 938.023.193
2. Tanah Seluas 109 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 657.921.212
3. Tanah Seluas 116 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 700.173.033
4. Tanah dan Bangunan Seluas 390 m<sup>2</sup>/162.5 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.896.037.533
5. Tanah Seluas 120.8 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 623.700.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 147.000.000

1. MOTOR, HONDA GL15A1RR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, BMW 250 R 25 Tahun 1955, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. MOTOR, BINTER MERZY 200 EE Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 32.229.550**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.517.337.547



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.512.422.068
III. HUTANG	Rp.	542.017.471
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.970.404.597

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.